

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan gender di Indonesia masih menjadi masalah sosial dan sulit diatasi (Kusuma et al., 2025). Perguruan tinggi merupakan lingkungan akademik yang diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh civitas akademik, baik mahasiswa maupun dosen. Selain berperan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pendidikan, kampus juga menjadi tempat terjadinya berbagai bentuk interaksi, hubungan antar mahasiswa maupun dosen, serta proses pembentukan nilai dan norma yang memengaruhi cara berpikir dan bertindak (Faturani, 2022). Namun, sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pada umumnya lingkungan kampus juga tidak terlepas dari berbagai persoalan sosial, salah satunya adalah kekerasan berbasis gender.

Kekerasan berbasis gender (KBG) merupakan bentuk kekerasan yang terjadi karena adanya konstruksi sosial mengenai peran, posisi, dan tanggung jawab laki-laki maupun perempuan dalam masyarakat. Konstruksi tersebut dapat menciptakan ketimpangan relasi kuasa dan menempatkan seseorang pada posisi yang lebih rentan mengalami kekerasan karena gendernya (Nadia, 2025). Kekerasan Berbasis Gender (KBG) pada dasarnya berakar pada persoalan struktural, terutama ketimpangan relasi kuasa, stereotip gender yang diskriminatif, serta tatanan patriarki yang masih berlangsung di masyarakat. Sedangkan, kekerasan berbasis seksual merupakan bentuk kekerasan yang secara khusus berkaitan dengan tindakan atau perilaku yang mengandung unsur seksual, baik berupa tindakan, percobaan, maupun pemaksaan yang dilakukan tanpa persetujuan korban atau dengan memanfaatkan ketimpangan posisi dan relasi kuasa (Saputra et al., 2022). Semua kekerasan seksual yang dipicu oleh ketimpangan gender merupakan bagian dari Kekerasan Berbasis Gender (KBG), namun tidak semua KBG berwujud kekerasan seksual.

Kekerasan gender dapat terjadi di berbagai kalangan tanpa memandang usia maupun jenis kelamin. Tindakan ini tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi

juga berdampak pada kondisi psikologis korban, yaitu seperti kehamilan yang tidak diinginkan, HIV, hingga depresi (Yusmana et al., 2025). Kekerasan gender tidak hanya menimbulkan dampak fisik maupun psikologis bagi korbannya, tetapi juga memunculkan sebuah fenomena baru yaitu *victim blaming*. *Victim blaming* merupakan sikap menyalahkan korban atas peristiwa yang menimpanya, sehingga korban dianggap ikut bertanggung jawab atas tindakan kejahatan yang dialaminya (Wulandari & Krisnani, 2020). Sebagian korban seringkali dinilai seolah-olah layak mengalami pelecehan seksual, karena masyarakat menganggap bentuk tubuh mereka dapat menarik tindakan tersebut. *Victim blaming* juga sering muncul ketika korban disalahkan hanya karena pulang larut malam (Wulandari & Krisnani, 2020). Dalam kasus kekerasan, korban seringkali tidak mendapatkan dukungan yang semestinya dari lingkungan sekitar. Akibatnya, korban tidak hanya menghadapi dampak dari kekerasan yang dialaminya tetapi juga harus menghadapi tekanan sosial dari lingkungan sekitarnya (Rukman et al., 2023).

Praktik *victim blaming* tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor yang paling dominan adalah budaya patriarki yang masih menempatkan perempuan pada posisi yang tidak setara dengan laki-laki. Budaya tersebut kemudian membentuk stereotip gender yang menganggap perempuan harus menjaga cara berpakaian, berperilaku, dan berinteraksi sesuai dengan norma yang berlaku (Putri, 2025). Selain itu, berkembangnya *rape myths* atau mitos mengenai kekerasan seksual juga memperkuat praktik *victim blaming*. (Kartini & Maulana, 2020). Kemudian, kurangnya edukasi mengenai kesetaraan gender, pengaruh media, lingkungan sosial, serta kurangnya edukasi mengenai kekerasan berbasis gender turut menyebabkan praktik *victim blaming* terus direproduksi dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Praktik *victim blaming* tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial dan proses penegakan hukum. Bagi korban, tindakan menyalahkan korban dapat menimbulkan pengalaman traumatis yang muncul kembali akibat respons negatif dari lingkungan sekitar. Dampak yang dirasakan dapat berupa trauma yang semakin mendalam, munculnya rasa bersalah

terhadap diri sendiri (*self-blame*), depresi, kecemasan, hingga risiko mengalami *post-traumatic stress disorder* (PTSD) (Wulandari & Krisnani, 2020). Budaya *victim blaming* juga membuat banyak korban memilih untuk diam dan tidak melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya karena takut menerima stigma, perundungan, atau penghakiman dari masyarakat. Akibatnya, kasus-kasus kekerasan menjadi banyak yang tidak terungkap (*underreporting*). Tidak hanya itu, praktik *victim blaming* juga dapat memperkuat impunitas pelaku (*perpetrator impunity*) karena perhatian masyarakat lebih tertuju pada perilaku korban daripada perbuatan pelaku. Pergeseran fokus tersebut menyebabkan pelaku seolah terbebas dari tanggung jawab, sehingga siklus kekerasan terus berulang dan upaya mewujudkan keadilan bagi korban menjadi terhambat (Wiayanti & Suarya, 2023).

Secara teoretis, konsep konstruksi sosial dikembangkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann melalui karya *The Social Construction of Reality* (1966). Mereka menjelaskan bahwa realitas sosial tidak terbentuk secara alamiah atau hadir begitu saja (*given*), tetapi merupakan hasil dari proses sosial yang berlangsung melalui tiga tahapan dialektis, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi (Sulaiman, 2025). Eksternalisasi merupakan proses ketika seseorang mengekspresikan pemikiran, pengalaman, dan pemahamannya melalui berbagai tindakan serta interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, pada tahap objektivasi yaitu proses hasil dari eksternalisasi yaitu memperoleh sifat objektif, lalu dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan benar oleh masyarakat. Setelah itu, melalui proses internalisasi nilai dan pemahaman yang telah dianggap menjadi hal wajar tersebut diterima secara luas dan diserap kembali oleh seseorang dan menjadi bagian dari cara mereka memandang suatu realitas. Dengan demikian, cara masyarakat menilai suatu peristiwa termasuk kasus kekerasan, tidak muncul dengan sendirinya melainkan terbentuk melalui proses sosial yang berlangsung secara terus-menerus dan diwariskan dalam kehidupan bermasyarakat (Tunur et al., 2022).

Secara empiris, urgensi persoalan ini tergambar jelas dari data yang dihimpun oleh Komnas Perempuan. Catatan Tahunan (CATAHU) 2025 Komnas Perempuan mencatat sebanyak 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang tahun 2025, meningkat 14,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya

dan merupakan rekor tertinggi sejak tahun 2016. Dari jumlah tersebut, kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan, yakni sebesar 37,51 persen, diikuti oleh kekerasan psikis, kekerasan fisik, dan kekerasan ekonomi (Saputra et al., 2022). Data ini juga menunjukkan bahwa mayoritas korban berada pada rentang usia 18 hingga 24 tahun, yang merupakan usia produktif mahasiswa di jenjang pendidikan tinggi, sehingga menegaskan bahwa lingkungan kampus merupakan salah satu ruang yang rentan bagi terjadinya kekerasan berbasis gender (Putri et al., 2024).

Data spesifik pada ranah pendidikan turut memperkuat gambaran tersebut. Komnas Perempuan mencatat bahwa sepanjang tahun 2020 hingga 2024 terdapat 97 pengaduan kasus kekerasan seksual di ranah pendidikan, dengan perguruan tinggi menempati posisi tertinggi sebanyak 42 kasus atau 43 persen, disusul pendidikan berbasis agama Islam sebanyak 17,52 persen, dan sekolah menengah sebanyak 16,49 persen. Bahkan, sekitar 83,62 persen dari keseluruhan kasus kekerasan berbasis gender di ranah pendidikan tersebut merupakan kekerasan seksual, dengan pelaku yang didominasi oleh pihak yang memiliki otoritas dan kepercayaan dari korban, seperti dosen, guru, maupun figur pengajar lainnya (Saputra et al., 2022).

Berbagai temuan yang disampaikan oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa banyaknya kasus kekerasan gender di lingkungan kampus yang terungkap ke publik sebenarnya hanya menggambarkan sebagian kecil dari kasus yang terjadi. Kondisi ini sering disebut sebagai fenomena gunung es, dimana masih banyak kasus yang tidak dilaporkan atau tidak diketahui (Komnas Perempuan, 2024). Untuk menanggapi hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan seperti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 yang kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2024 tentang pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di setiap perguruan tinggi. Namun,

keberadaan aturan dan Satgas tersebut belum sepenuhnya mampu mengubah cara mahasiswa maupun civitas akademik dalam memandang dan merespons kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi di lingkungan kampus. Sebagai bagian dari upaya untuk mengidentifikasi serta memahami dinamika kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, Women Studies Centre (WSC) pada tahun 2019 mencatat adanya 93 kasus kekerasan seksual yang terjadi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Saiba & Oktaviani, 2023).

Sama halnya dengan yang terjadi di lingkungan kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung, fenomena *victim blaming* ini seringkali ditemui. Kasus-kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan oknum dosen maupun mahasiswa beberapa kali menjadi perhatian publik. Salah satunya kasus yang melibatkan video bermuatan asusila yang menyangkut mahasiswi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, baik yang masih aktif maupun telah menjadi alumni (Suaka Online, 2025). Pada kasus-kasus tersebut, tanggapan dari sebagian pihak di lingkungan kampus justru cenderung mengarahkan perhatian pada perilaku korban dan tidak sedikit yang berpendapat agar persoalan tersebut tidak terus diangkat atau dibahas. Kemudian, candaan yang merendahkan tubuh perempuan masih kerap dianggap sebagai sesuatu yang wajar di ruang akademik sering terjadi, faktanya di balik candaan tersebut terdapat ketidaknyamanan dan martabat yang direndahkan. Persoalan tersebut bukan sekedar pelanggaran etika, melainkan cerminan dari cara pandang yang masih patriarki yaitu masih menempatkan tubuh perempuan sebagai objek dan cara pandang inilah yang pada akhirnya turut membentuk perilaku-perilaku yang bias terhadap korban kekerasan berbasis gender.

Menurut berita harian Tribun Jabar.id yang ditulis oleh Putri Puspita Nilawati per tanggal 8 Desember 2025 dengan judul artikel “UIN Bandung Gandeng Komnas Perempuan Dorong Kampus Aman dari Kekerasan Seksual” melihat pada sumber yang telah dijelaskan, data tahunan pada tahun-tahun berikutnya belum disampaikan secara lengkap oleh pihak kampus. Namun, Satgas P2KS UIN Bandung menyatakan bahwa pada tahun 2025 jumlah laporan kasus mengalami peningkatan. Kemudian, terdapat kasus pelecehan seksual yang melibatkan dosen dan penanganannya diserahkan kepada Kementerian Agama.

Fenomena *victim blaming* juga terjadi di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Beberapa kasus yang sempat mendapat perhatian, termasuk kasus penyebaran konten bermuatan asusila yang melibatkan mahasiswi, menunjukkan bahwa masih terdapat pihak yang lebih banyak mempertanyakan perilaku dan latar belakang korban daripada melihat tanggung jawab pelaku. Di sisi lain, candaan yang berkaitan dengan tubuh perempuan juga masih ditemukan dalam interaksi sehari-hari di lingkungan kampus. Candaan tersebut terkadang dianggap sebagai sesuatu yang biasa atau normal.

Tanggapan seperti ini memperlihatkan bahwa masih terdapat perbedaan antara upaya yang dilakukan kampus secara formal dalam mencegah dan menangani kekerasan berbasis gender dengan kenyataan mengenai cara sebagian civitas akademik memandang korban. Sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam yang menjunjung nilai akhlak, kondisi tersebut menjadi hal yang perlu diperhatikan. Nilai-nilai keagamaan yang seharusnya dapat mendorong sikap untuk menghormati dan melindungi korban pada kenyataannya belum sepenuhnya mampu menghilangkan sikap menyalahkan korban dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kampus. Kondisi ini menjadi salah satu alasan penting untuk mengkaji fenomena *victim blaming*, karena persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan sikap seseorang terhadap korban, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai, norma, dan relasi kuasa yang berkembang dalam lingkungan kampus.

Berdasarkan uraian teoretis dan fakta lapangan yang telah dipaparkan, penelitian mengenai konstruksi sosial *victim blaming* dalam kasus kekerasan berbasis gender ini memang perlu untuk dilakukan. Dari fenomena yang terjadi, pendekatan teori konstruksi sosial oleh Peter L Berger relevan untuk digunakan karena teori ini menjelaskan bagaimana cara pandang dan keyakinan tertentu dapat terbentuk yang akhirnya diterima sebagai sesuatu yang dianggap wajar. Jika dilihat dari teori konstruksi sosial, dapat dipahami bahwa sikap menyalahkan korban merupakan hasil dari pola pikir yang dibangun. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana konstruksi *victim blaming* ini bisa terbentuk di Lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Berangkat dari kondisi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Konstruksi Sosial *Victim Blaming* dalam Kasus Kekerasan Berbasis Gender di Lingkungan Kampus (Penelitian di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung)".

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi, yaitu sebagai berikut :

1. Kasus kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus masih seringkali terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa kampus belum sepenuhnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi mahasiswa, terutama perempuan. Kondisi ini terlihat dari masih adanya laporan kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus serta meningkatnya perhatian terhadap isu kekerasan seksual di perguruan tinggi.
2. Korban kekerasan berbasis gender seringkali mendapatkan perlakuan *victim blaming*, yaitu sikap menyalahkan korban atas peristiwa yang dialaminya. Korban kerap dianggap sebagai penyebab terjadinya kekerasan karena cara berpakaian, cara mereka bergaul, atau aktivitas yang dilakukan.
3. Adanya konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat dan lingkungan kampus yang menormalisasi sikap menyalahkan korban sehingga sikap *victim blaming* ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau dinormalisasikan.
4. Kuatnya budaya patriarki dan stereotip gender yang memengaruhi cara pandang masyarakat dalam melihat korban dan pelaku kekerasan berbasis gender, sehingga perempuan lebih sering ditempatkan sebagai pihak yang harus menjaga diri dan dianggap bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi.
5. Pemahaman mengenai kesetaraan gender dan dampak *victim blaming* masih kurang, sehingga banyak sekali orang yang belum menyadari sikap menyalahkan korban dapat memperburuk kondisi korban dan membuat korban merasa takut, malu, serta enggan untuk melapor.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalahnya dapat disusun sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang melatarbelakangi munculnya *victim blaming* pada korban di Lingkungan Kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung?
2. Bagaimana bentuk-bentuk *victim blaming* yang muncul di Lingkungan kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung ?
3. Bagaimana upaya pembentukan konstruksi sosial dalam kasus kekerasan yang berbasis keadilan gender ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan *victim blaming* itu muncul pada korban.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk *victim blaming* yang terjadi di lingkungan kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya membentuk konstruksi sosial dalam kasus kekerasan yang berkeadilan gender agar lebih setara.

D. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa hal dapat bermanfaat baik secara akademis maupun praktis, dengan mengangkat penelitian ini diantaranya:

1. Kegunaan Akademis (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu sosiologi, khususnya dalam kajian tentang konstruksi sosial, gender, dan kekerasan berbasis gender. Temuan penelitian ini dapat membantu menjelaskan bagaimana *victim blaming* muncul, terbentuk, dan dinormalisasikan sebagai suatu konstruksi dalam masyarakat, terutama di lingkungan kampus. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain yang mengkaji isu serupa.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan pemahaman yang lebih

mendalam kepada mahasiswa, dosen, dan pihak kampus untuk lebih memahami bagaimana *victim blaming* berdampak pada korban kekerasan gender. Dengan mengetahui faktor serta bentuk-bentuk *victim blaming*, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kesadaran, membangun lingkungan kampus yang lebih aman serta mendukung pencegahan kekerasan berbasis gender. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga kampus dan Satgas PPKS untuk mengurangi budaya menyalahkan korban. Kemudian, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat luas mengenai bahaya dan dampak *victim blaming* terhadap korban kekerasan gender. Dengan memahami bagaimana konstruksi sosial tersebut terbentuk, masyarakat diharapkan lebih mampu membangun sikap empati dan tidak lagi menormalisasi perilaku yang menyalahkan korban. Selain itu, penelitian ini dapat turut mendorong perubahan budaya khususnya dalam memutus rantai stereotip gender dan norma patriarki yang menjadi akar munculnya *victim blaming* ini.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa kekerasan berbasis gender masih sering terjadi di lingkungan kampus. Banyaknya kasus kekerasan gender, korban bukan hanya mengalami tindakan kekerasan tetapi juga mendapatkan sikap masyarakat yang merugikan berupa menyalahkan korban atau *victim blaming*. Sikap tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkembang dari budaya, cara pandang, relasi kuasa, dan stereotip yang berkembang dan diwariskan di lingkungan masyarakat. Kampus atau lingkungan pendidikan seharusnya menjadi ruang aman bagi mahasiswa, tetapi ternyata masih menghadirkan persoalan ini. sehingga sebagian korban merasa takut, ragu, atau enggan melapor.

Dalam upaya memahami mekanisme terbentuknya suatu cara pandang, penelitian ini mengacu pada teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Teori ini menjelaskan bahwa konstruksi sosial ini merupakan proses ketika masyarakat membentuk suatu realitas melalui interaksi yang berlangsung secara terus-menerus. Berger menjelaskan bahwa berbagai hal

yang kita anggap sebagai “kenyataan” seperti norma, nilai, peran sosial, maupun pandangan moral sesungguhnya dibuat oleh manusia sendiri, lalu perlahan diterima sebagai sesuatu yang biasa dan dinormalisasi oleh masyarakat (Dharma, 2018). Teori ini menjelaskan bahwa pola pikir masyarakat terbentuk melalui tiga tahapan, yaitu eksternalisasi ketika pandangan mulai diungkapkan melalui ucapan atau tindakan. Kemudian, objektivasi ketika pandangan tersebut mulai diterima dan dianggap wajar atau dinormalisasikan. Lalu, internalisasi yaitu ketika akhirnya pandangan itu diyakini dan menjadi bagian dari cara berpikir. Kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus dapat memunculkan perilaku *victim blaming*, lalu dijelaskan melalui proses pembentukan realitas sosial menggunakan Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger. Proses berpikir ini berangkat dari pemahaman bahwa kampus bukan hanya tempat untuk belajar, tetapi juga ruang sosial yang dipengaruhi oleh ketimpangan gender. bentuk kekerasan berbasis gender muncul ketika mahasiswa mengalami pelecehan. Situasi seperti ini kemudian memicu munculnya perilaku *victim blaming*, yaitu kecenderungan menyalahkan korban atas peristiwa yang menimpa mereka dengan menyalahkan cara berpakaian, cara mereka bergaul, atau hal lain yang dianggap sebagai penyebab terjadinya kekerasan. Teori konstruksi sosial menjelaskan bahwa cara berpikir seperti ini tidak muncul atau terbentuk secara tiba-tiba, tetapi melalui proses sosial yang berulang, proses tersebut terdiri dari tiga tahap yaitu :

1. Eksternalisasi

Pada tahap ini, seseorang akan mulai mengenali dan mengamati realitas sosial di sekitarnya. Dalam proses ini, individu memahami kenyataan tersebut berdasarkan cara pandangannya sendiri. Lalu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan budaya yang dibentuk oleh manusia (Anriani, 2024). Misalnya, ketika terdapat kasus pelecehan seksual mereka mulai mengomentari bahwa korban seharusnya menjaga diri atau tidak pulang malam. Pandangan ini lahir dari nilai dan budaya yang sudah ada sebelumnya.

2. Obyektivasi

Pada tahap ini, realitas sosial yang awalnya hanya dipahami oleh individu mulai terbentuk melalui interaksi antar manusia. Dalam proses ini, pola hubungan

dan tindakan yang berlangsung terus-menerus kemudian berkembang menjadi aturan, norma, atau lembaga yang diakui oleh banyak orang. Ketika suatu realitas sudah mengakar, ia tidak lagi bergantung pada pandangan masing-masing individu tetapi hadir sebagai sesuatu yang dianggap nyata (Anriani, 2024). Jadi, pandangan-pandangan yang mulanya hanya opini pribadi diterima sebagai sesuatu yang dianggap “normal” dalam lingkungan masyarakat. Hal ini terlihat dari reaksi ketika terjadi kasus pelecehan, orang akan lebih cepat mempertanyakan perilaku korban daripada menyoroti pelaku. Sesuai dengan penjelasan Berger, objektivasi merupakan proses ketika konstruksi sosial tampak seperti kenyataan objektif yang berdiri sendiri, bukan hasil interpretasi manusia.

3. Internalisasi

Internalisasi ini merupakan proses ketika seseorang mulai menerima makna-makna yang berlaku dalam masyarakat. Melalui sosialisasi maupun berbagai bentuk interaksi, makna-makna tersebut akhirnya dipahami dan dianggap sebagai bagian dari cara ia berpikir dan bertindak (Anriani, 2024). Pandangan-pandangan ini mulai diterima sebagai kebenaran atau dinormalisasi oleh masyarakat. Akibatnya, praktik *victim blaming* direproduksi terus-menerus yang kemudian orang tidak lagi mempertanyakan apakah *victim blaming* benar atau salah, karena pandangan tersebut sudah menjadi bagian dari cara mereka memahami realitas.

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

